

Perempuan Nelayan Dalam Cengkeraman Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari: Pengalaman Pendampingan¹

Oleh: Sarni Marwanti & Masthuriyah Sa'dan
Solidaritas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara
& Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Sarni.2003@gmail.com & masthuriyah.sadan@gmail.com

Abstrak

Pembangunan reklamasi teluk Kendari merupakan program pembangunan emas pemerintah kota Kendari. Pembangunan tersebut menimbulkan dampak buruk yang luar biasa kepada kehidupan masyarakat sekitar pesisir teluk. Dampak terburuk tersebut dirasakan oleh perempuan nelayan Kendari. Tulisan ini merupakan kajian pengalaman pendampingan Solidaritas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pengalaman pendampingan, pembangunan reklamasi teluk Kendari menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap alam dan perubahan struktur sosial-ekonomi-budaya masyarakat pesisir. Tidak hanya itu, pembangunan reklamasi juga berdampak kepada kehidupan nelayan perempuan dan keluarganya. Dengan berbagai dampak dan resiko dari pembangunan reklamasi tersebut, perempuan nelayan "rentan" menjadi perempuan yang marginal dan terdiskriminasi dalam masyarakat. Ditambah kemudian, tidak adanya pengakuan dari pemerintah bahwa nelayan tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tapi perempuan nelayan juga ada dalam masyarakat pesisir teluk Kendari.

Kata Kunci: Perempuan nelayan, Pembangunan, reklamasi, Kendari.

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk agenda pembangunan global adalah pembangunan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan menjadikan mekanisme globalisasi terjadi mulai pada tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional khususnya di Sulawesi Tenggara tertuang dalam Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sultra 2013-2018 yaitu "*Mewujudkan Kesejahteraan, Mandiri dan Berdaya Saing*". Melalui Visi misi tersebut, pemerintah ingin membangun Kota Kendari seperti Kota Besar lainnya dengan desain yang ada di negara-negara maju, dengan cara mengembangkan Kota Kendari yang siap bersaing.

Konteks dari salah satu misinya yaitu Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke wilayah dan Kawasan Strategis, dengan maksud untuk mengembangkan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan simpul-simpul perekonomian serta

¹ Tulisan ini merupakan tugas kelompok pertama untuk dipresentasikan pada materi "Perempuan Melawan Perdagangan Bebas & Investasi" dalam rangkaian kegiatan Sekolah Kepemimpinan Feminis (SKF) Angkatan Pertama yang dilaksanakan oleh Perserikatan Solidaritas Perempuan Nasional pada bulan Mei-September 2017. Kelompok pertama terdiri dari Sarni Marwanti (SP Kendari), Masthuriyah Sa'dan (SP Kinasih Yogya), Emilia (SP Palembang), Ramlah (SP Angging Mammiri Makasar), Eva Juwita (SP Jabotabek) dan Hadi'atul Hasanah (SP Sumbawa NTB).

pembangunan infrastruktur kawasan strategis untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui 6 mega proyek Sulawesi Tenggara, salah satunya adalah pembangunan Kendari Newport, yang merupakan agenda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk mengembangkan kawasan Teluk Kendari dan Bungku Toko (jembatan BAHTERAMAS) yang akan menjadi sebuah akses baru untuk menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tenggara dengan menelan anggaran sekitar 800 miliar.

Pembangunan infrastruktur tersebut sebagai upaya konkrit pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi dan daya saing daerah. Namun kondisi yang demikian berbanding terbalik dengan program lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ekonomi menengah kebawah khususnya perempuan. Seperti peningkatan kapasitas pengrajin, akses modal bagi perempuan usaha kecil yang semakin sulit, kurang tersedianya program-program untuk petani perempuan dan nelayan tradisional, upah buruh yang masih rendah dan dampak lainnya.

Rancangan Peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan daya saing masyarakat Sulawesi Tenggara yang dicanangkan melalui percepatan dan pemerataan pembangunan diperkuat dengan berbagai kebijakan yang lahir melalui pemerintah dan legislatif diantaranya UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang diturunkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sultra No 2 Tahun 2014, UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga diturunkan dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut. PP No 122 tahun 2012 Tentang reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hingga implementasi rencana pembangunan wilayah pesisir pada Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kota Kendari, namun tidak diikuti dengan kebijakan lainnya pada penguatan dan peningkatan usaha kecil dan menengah khususnya perempuan.

Disini menimbulkan persoalan kepada perempuan nelayan, karena dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kota Kendari dijelaskan bahwa pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan, pada pembangunan sarana dan prasarana umum, ruang terbuka hijau dan wilayah pengembangan pusat perekonomian Sulawesi Tenggara, proyek pembangunan tersebut telah berjalan disepanjang kurang lebih 19,05 km Pantai Teluk Kendari. Resikonya, pembangunan tersebut berdampak besar pada kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir khususnya dialami oleh nelayan perempuan, dan disinilah titik persoalan tulisan ini. Karena hingga kini Indonesia juga belum memiliki aturan khusus untuk pengakuan dan perlindungan perempuan nelayan sebagaimana rekomendasi FAO dalam 14th *Session of FAO Sub-Committee on Fish Trade* kepada Negara-negara anggotanya. Karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah. Maka kelompok perempuan nelayan menjadi kelompok yang tersisihkan dan cenderung memiliki kerentanan tersendiri.

Tulisan ini merupakan pengalaman selama melakukan pendampingan yang dilakukan oleh komunitas Solidaritas Perempuan Kendari. Pertanyaan utama dalam tulisan ini adalah, bagaimana dampak pembangunan reklamasi teluk kendari terhadap kehidupan nelayan perempuan. Analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah analisa interseksionalitas untuk mengetahui keterhubungan antar aktor dan korban (nelayan perempuan).

B. Realita Reklamasi Teluk Kendari

Agenda pembangunan Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari agenda pembangunan Nasional melalui program NAWACITA, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur dan membangun dari pinggir yaitu membuat jalan lintas Kabupaten/Kota, Provinsi, pembangunan gedung-gedung megah, pembangunan pasar modern/mall, pengembangan pariwisata hingga mega proyek reklamasi. Bila dilihat dari sejarahnya reklamasi sudah dimulai sejak seratus hingga dua ratus tahun yang lalu, reklamasi di dunia pertama kali adalah Kota Dubai dengan pembuatan pulau baru berbentuk pohon palm dengan luas 572,1 hektar yang didalamnya berdiri berbagai fasilitas termewah berskala Internasional. Selain itu reklamasi Belanda merupakan salah satu contoh reklamasi sukses dunia yang mendorong Indonesia untuk melakukan reklamasi serupa. Upaya reklamasi dilakukan oleh Negara Belanda untuk berbagai tujuan besar, seperti untuk mencegah banjir berkepanjangan, yang mengganggu industri pertanian, hingga meningkatkan kondisi ekonomi negara. Saat ini, sistem reklamasi, hidrologi, dan drainase Belanda seringkali menjadi referensi bagi banyak proyek reklamasi pesisir dan danau di seluruh dunia (<file:///D:/Dok.reklamasi>) dan masuk ke Indonesia sejak Tahun 1990 melalui reklamasi teluk Jakarta yang hingga saat ini sudah melebar sampai ke beberapa daerah di Indonesia salah satunya reklamasi teluk Kendari.

Reklamasi teluk Kendari sudah direncanakan sejak Tahun 2012 lalu oleh pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk menanggulangi laju pendangkalan akibat sedimentasi yang terjadi. Tahun 2014 sedimentasi mencapai kurang lebih 90 juta ton, dan penyumbang terbesar dari sedimen tersebut, terdiri dari tiga sumber utama, yakni luapan lumpur dari 16 sungai, aktifitas pengolahan di Gunung Nipa-nipa dan Nangananga, serta aktivitas masyarakat Kota Kendari terutama dalam memanfaatkan kawasan di sekitar Teluk Kendari sebagai lokasi membangun rumah dan sejumlah gedung (<http://www.beritalingkungan.com>). Penggundulan hutan akibat aktifitas perkebunan kelapa sawit di tiga kabupaten (Kabupaten Konawe, Konawe selatan dan Konawe Utara) juga penyumbang sedimentasi teluk Kendari yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah provinsi. Luas perairan teluk Kendari 19,05 km² dikelilingi oleh 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan, dalam rancangan pembangunan reklamasi teluk Kendari sejak awal telah menuai banyak protes oleh berbagai pihak karena tidak memperhatikan kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat khususnya perempuan nelayan. Namun tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah dengan mengganti istilah menjadi revitalisasi teluk Kendari.

Revitalisasi dijadikan alasan utama bagi pemerintah daerah dalam pembangunan reklamasi teluk Kendari. Seperti yang dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam pada saat mengajukan usulan kegiatan reklamasi teluk Kendari kepada Menteri Dalam Negeri *“apabila tidak dilakukan upaya antisipatif untuk permasalahan tersebut, maka keberadaan fasilitas penting seperti pelabuhan dan aktivitas masyarakat terancam kemanfaatannya, sebab itu perlu usaha penyelamatan teluk Kendari dari sedimentasi dan pencemaran, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi, lingkungan dan estetika”*. Antisipasi tersebut dilakukan melalui (1) menetapkan kawasan teluk Kendari sebagai kawasan strategis ekonomi dalam dokumen RTRW Provinsi dan Kota Kendari (2) mengatur dan menetapkan rencana pemanfaatan lahan kawasan teluk Kendari (3) melakukan inventarisasi pemilikan lahan di sekitar teluk Kendari (4) merancang pembangunan teluk Kendari secara terpadu dan menyusun kajian lingkungan hidup strategis.

Merancang pembangunan teluk Kendari yang menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih

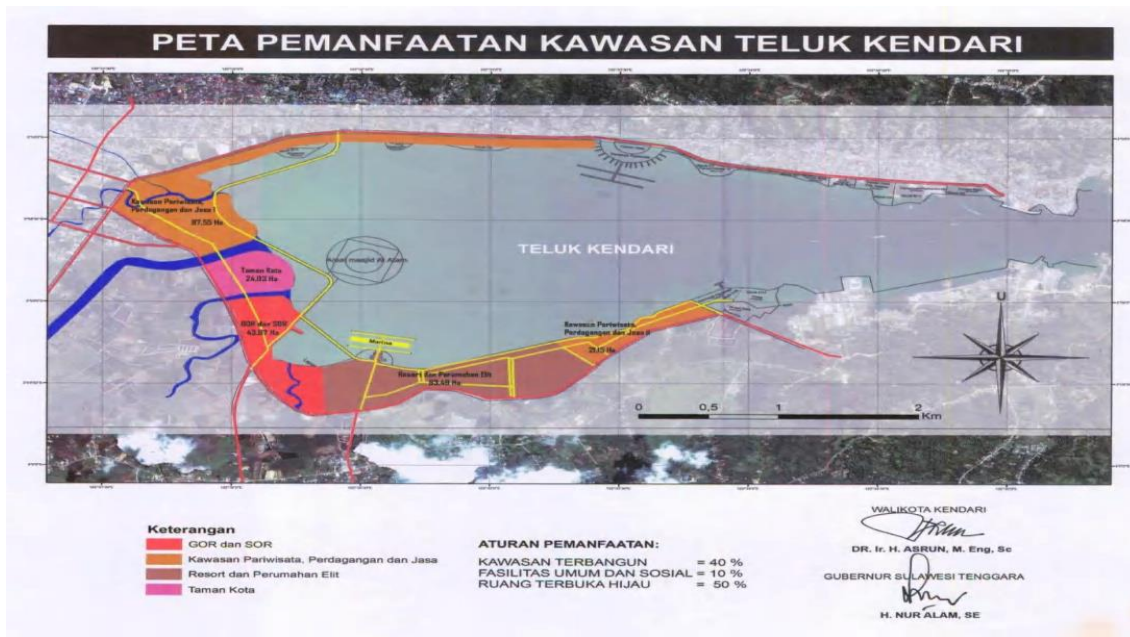
dari 1 triliun, dan ini dijadikan salah satu alasan dari solusi pendangkalan yang terjadi bukan malah pada bagaimana mengantisipasi pendangkalan. Dibawah ini merupakan tabel anggaran revitalisasi teluk kendari.

| Anggaran Revitalisasi Teluk Kendari | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|---|
| No | Rencana Pembangunan | Anggaran | Sumber Anggaran |
| 1 | Jembatan Bahteramas | 750 Milliar | APBN |
| 2 | Mesjid Al Alam | 250 Milliar | APBD Provinsi Sultra |
| 3 | Tambat Labuh & Reklamasi | 10 Milliar | APBD Provinsi Sultra |
| | Tambat Labuh & Reklamasi | 71 Milliar | Dana Bansos Pasca Bencana dari ABPN. Alokasi bencana un Kota Kendari, Konawe Utara dan Kolaka Utara |
| 4 | Tambat Labuh & Reklamasi & Water Sport Center | 66 Milliar | APBD Kota Kendari |
| Total | | 1 triliun, 147 Milliar | <i>Data Diolah Tim Sekilas Kendari</i> |

Gambar I: Anggaran revitalisasi teluk Kendari
 Sumber <https://sekilaskendari.blogspot.co.id>

Karena aktivitas pendangkalan tersebut, aktifitas dihulu sungai dan aktifitas pembangunan gedung-gedung megah tidak terkendali dan tidak memperhitungkan keberlangsungan lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung wilayah perairan teluk. Padahal pembangunan yang saat ini sudah terjadi seperti pembangunan Hotel Megah, Rumah Makan, Rumah Sakit, Pom Bensin dan pembangunan lainnya dikawasan teluk Kendari telah menyebabkan sumber pendangkalan dan meresahkan masyarakat yang tinggal disekitar Teluk Kendari.

Kondisi tersebut diperparah dengan rencana reklamasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kendari. Pemerintah melancarkan terlaksananya reklamasi sebagai salah satu agenda pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan tersebut untuk mendorong Kota Kendari menjadi salah satu Kota tujuan pariwisata Manca Negara dan juga memberikan peluang besar bagi para investor dan pelaku usaha, dimana mereka dapat menanamkan modalnya pada pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut serta penguasaan pasar. Trend dan ide-ide pembangunan skala dunia juga salah satu produk global yang terealisasi dalam berbagai megah proyek salah satunya melalui pembangunan Mesjid Al-Alam yang terletak di dalam teluk, pembangunan ini terinspirasi dari reklamasi teluk skala dunia yang ada di Dubai dan Belanda dan dijadikan mesjid termegah dunia kedua yang terletak di tengah teluk dengan pemandangan laut. Hotel dan Mall, taman kota dan plaza dan pasar modern serta berbagai fasilitas mewah lainnya. hal tersebut terealisasi melalui berbagai kebijakan baik ditingkat Nasional maupun Daerah.

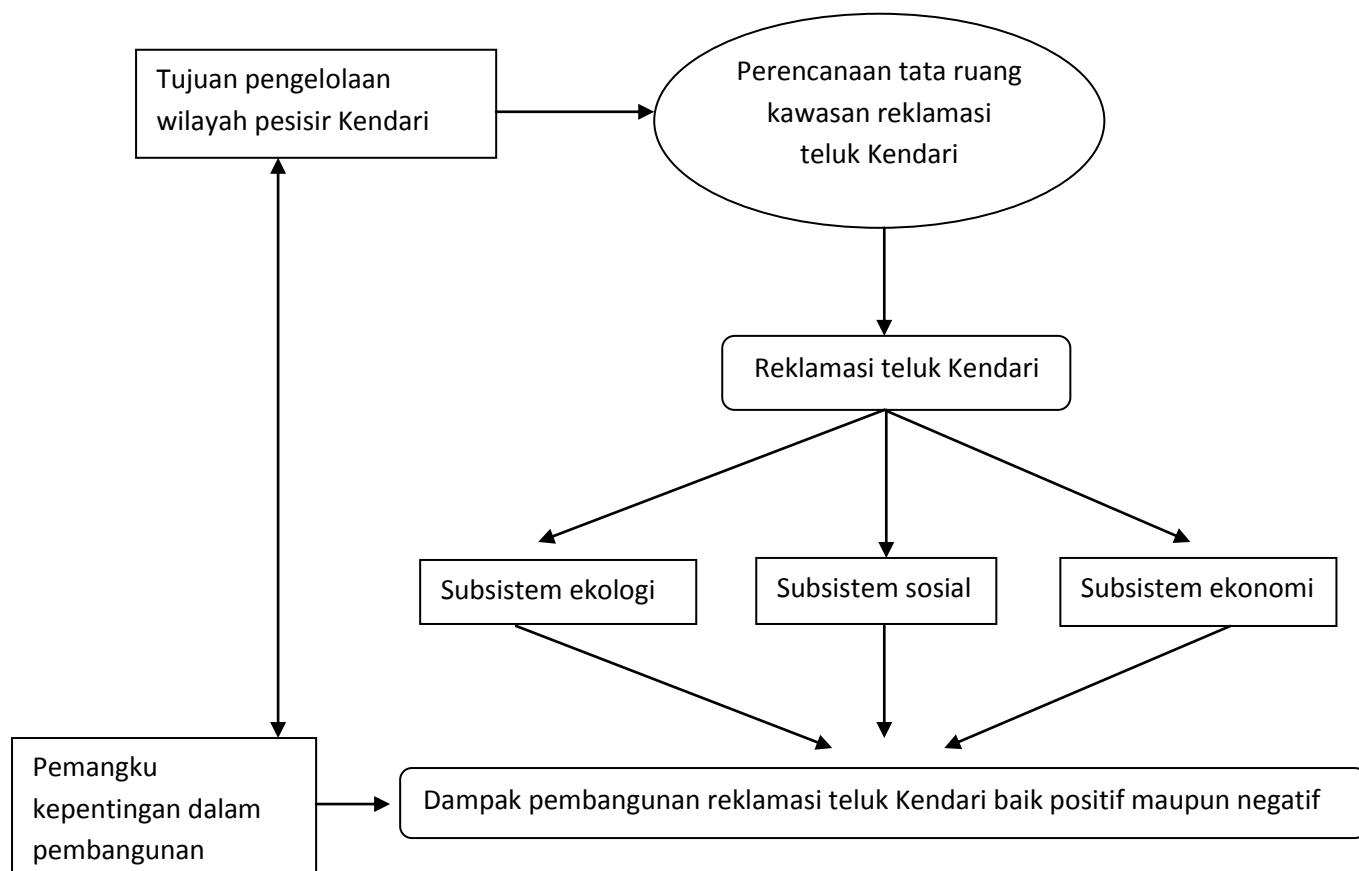


Gambar 2: Peta pemanfaat kawasan teluk Kendari

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2014-2034 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah yang terancam terkena dampak buruk reklamasi terdiri dari 6 kecamatan dan 20 kelurahan yang terdiri dari kecamatan Abeli kelurahan Abeli, Tondonggeu, Sambuli, Bungkutoko, Nambo, Petoaha, Poasia, Lapulu, Pudai. Kecamatan Kendari kelurahan Purirano. Kecamatan Kendari Barat kelurahan Watu-watu, Lahundape, Kemaraya, Sodohoa, Benu-benua, Punggaloba, Sanua, Dapu-dapura. Kecamatan Poasia kelurahan Matabubu, Anggoeya, Rahandouna, Anduonohu. Kecamatan Mandonga. Kelurahan Korumba. Kecamatan Wua-wua kelurahan Mokoau dan Bonggoeya dengan luas wilayah terdampak 4.203,44 Ha (RPJM Kendari:16-17).

Secara sederhana kerangka berpikir pembangunan reklamasi teluk Kendari dapat dilihat secara seksama sebagai berikut:



Gambar 3: Skema Kerangka Berpikir Pembangunan Teluk Reklamasi

C. Reklamasi & Penggusuran Perempuan

Istilah reklamasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:2008,1188) diartikan sebagai penggerukan tanah atau juga memperluas pertanian dengan memanfaatkan daerah yang sebelumnya tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU (Djakapermana:TT) bahwa reklamasi adalah pembukaan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara penggerukan, pengeringan lahan atau drainase. Dengan demikian, reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru baik yang menyatu dengan wilayah pantai atau yang terpisah dari pantai dengan cara penggerukan, pengeringan lahan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

Tujuan dari adanya pembangunan reklamasi adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan

pertokoan, pertanian, objek wisata dan lain sebagainya (Modul terapan:TT,16). Reklamasi pantai merupakan salah satu strategi untuk melakukan pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh Negara-negara besar dengan laju pertumbuhan pendudukan yang sangat pesat tetapi mengalami kendala karena menyempitnya lahan daratan. Karena pemekaran kota ke daratan lain sudah tidak memungkinkan, maka satu-satunya cara adalah membuat daratan baru dengan cara reklamasi pantai (Modul terapan:TT,17).

Segala pembangunan apapun itu, tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatif. Berdasarkan hasil diskusi dengan KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan). Direktur KIARA, bahwa dampak positif dari pembangunan reklamasi itu adalah menghidupkan kembali transportasi air, membuka peluang pembangunan wilayah pesisir, meningkatkan pariwisata bahari, meningkatkan pendapatan daerah, dan banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Tapi dampak negatif yang dihasilkan oleh pembangunan reklamasi pantai lebih besar ketimbang dampak positifnya. Diantara dampak negatif yang dihasilkan oleh pembangunan reklamasi pantai adalah dampak fisik, dampak biologis, dampak ekologis, dampak sosial-ekonomi dan budaya.

Dampak fisik tersebut antara lain perubahan hidro-oseanografi, erosi pantai, sedimentasi, peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, perubahan rejim air tanah, peningkatan potensi banjir dan penggenangan wilayah pesisir. Dampak biologis dari reklamasi pantai antara lain, terganggunya ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan penurunan keanekaragaman hayati. Dampak ekologis adalah karena pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat, tapi karena pembangunan reklamasi maka akan hilang pemanfaatannya dan beralih menjadi ruang privat, keanekaragaman biota laut juga akan berkurang baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah urugan akan mempengaruhi ekosistem yang sudah ada, serta system hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubag dari yang semula alami menjadi buatan. Maka berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan terjadi apa yang namanya abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob. Sedangkan dampak sosial-ekonomi-budaya adalah kegiatan masyarakat di wilayah pantai yang sebagian besar adalah nelayan, baik nelayan ikan, buruh ikan, maupun petani tambak, maka dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan dan berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat pesisir pantai. Karena dampak negatif dari reklamasi sangatlah besar, maka pembangunan reklamasi semestinya memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan lingkungan dengan orientasi jangka panjang.

Pembangunan reklamasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara seharusnya memperhatikan tiga kategori yaitu: *pertama*, zona preservasi yaitu suatu wilayah yang mengandung atribut ekologis dan biologis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup ekosistem dan seluruh komponennya, yang meliputi biota (organisme) termasuk kehidupan manusia, spesies langka atau endemic, habitat, berbagai biota ikan, dan biota laut lainnya, sumber air tawar. Di dalam zona ini tidak diperkenankan kegiatan pemanfaatan atau pembangunan kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. *Kedua*, zona konservasi yaitu wilayah yang diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan, tetapi dengan entitas yang terbatas dan sangat terkendali, misalnya wisata bahari, perikanan tangkap dan budi daya yang ramah lingkungan dan pengusahaan hutan mangrove secara lestari. Zona ini bersama preservasi berfungsi untuk memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus hidrologi dan unsur hara, membersihkan limbah secara alamiah, dan sumber keanekaragaman hayati. *Ketiga*, zona pemanfaatan yaitu wilayah yang

karena sifat biologis dan biologisnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang lebih intensif, antara lain seperti industri, pertambangan dan pemukiman. Namun kegiatan pembangunan dalam zona pemanfaatan selayaknya harmonis dan mengikuti karakteristik ekologis (Iwan Nugroho & Rokhmin Dahuri, 2012:306-307). Akan tetapi realita yang ada tidaklah demikian.

Menurut Arieska Kurniawati (<http://www.solidaritasperempuan.org>) bahwa reklamasi pesisir pantai memperburuk situasi karena merampas wilayah kelola nelayan dan menghancurkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Akibatnya, kemiskinan merajalela di masyarakat pesisir pantai. Dan wajah kemiskinan tersebut selalu dilekatkan kepada perempuan. Mengapa perempuan....? Karena perempuan nelayan sebagian besar mencari ikan di laut atau mengumpulkan kerang di pesisir pantai hidupnya sangat bergantung kepada kekayaan laut dan pesisir. Disamping itu, perempuan nelayan juga menjadi penanggung jawab tunggal rumah tangga ketika ditinggal melaut, perempuan nelayan bekerja sebagai pemindang ikan, pengering ikan, berdagang ikan dan produksi petis ikan serta kerupuk ikan. Bahkan tidak sedikit, perempuan di pesisir pantai yang menjadi buruh angkut dan membuka warung atau toko dengan menjual barang-barang kebutuhan konsumsi sehari-hari. Berdasarkan data *Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO) bahwa sebanyak 15% pelaku sektor primer perikanan (penangkapan dan budidaya) adalah perempuan. Sedangkan di sektor sekunder perikanan (pengolahan) jumlah pekerja perempuan mencapai angka 90% (<http://www.fao.org>). jika pembangunan reklamasi terus berlanjut, maka pemerintah telah melakukan penggusuran secara pelan-pelan kepada rakyat miskin utamanya perempuan yang hidupnya di pesisir pantai.

D. Identitas Perempuan Nelayan Kendari

Berdasarkan data pusat statistis Kendari, penduduk kota Kendari berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 359.371 jiwa yang terdiri dari 181.392 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 177.979 jiwa dengan jenis kelamin perempuan. (2016:61). Perempuan yang bekerja sebanyak 49.256 jiwa (2016:88). Sedangkan indeks kemiskinan di kota kendari pada tahun 2016 mencapai garis kemiskinan 291.069, dengan presentase penduduk miskin 5.51% dan kedalaman kemiskinan 0.69% dengan keparahan kemiskinan 0.17% (2016:154).

Berdasarkan pengalaman pendampingan, perempuan pesisir teluk kendari mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh perikanan. Perempuan nelayan Kendari merupakan suku Bajo yang sejak dahulu menempati wilayah pesisir kendari. Rata-rata pendidikan perempuan nelayan suku bajo tamat SD/SMP bahkan sebagian tidak sekolah sehingga mereka buta huruf. Meski demikian, perempuan nelayan suku bajo mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara melaut atau menjual hasil tangkapan.



Gambar 4: Dokumentasi pendamping dengan perempuan nelayan suku Bajo Kendari (12/01/2017)

Sebelumnya perempuan dapat menikmati teluk dengan cara mereka sendiri dengan kebiasaan melaut yang turun temurun terus terpelihara, pembagian peran dalam rumah tangga juga jelas dimana suami nelayan keluar subuh setiap pukul 05.00 WIB untuk mencari ikan diteluk dengan sampan dan alat-alat tradisional. Sedangkan istrinya mempersiapkan segala kebutuhan suami. Setelah melaut pada pukul 11.00 WIB suami akan kembali pulang dengan membawa hasil yang kemudian akan dijual oleh istrinya dipasar-pasar tradisional ataupun dijajakan dipinggir jalan depan rumah mereka sedangkan suaminya akan menjaga anak mereka dirumah. Hasil penjualan dijadikan sebagai sumber pendapatan keluarga, sebagian yang lain menjadi bahan pangan sumber protein dan gizi utama seluruh anggota keluarga. Hasil penjualan tersebut kemudian menjadi penopang utama keluarga mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak, biaya kesehatan dan lain sebagainya.

Di waktu sore pada pukul 15.00 nelayan akan kembali turun kelaut untuk mencari ikan dan kembali pukul 17.00 hasilnya juga akan dijual bersama dengan istrinya. Hal ini terus terjadi secara turun temurun, keluarga nelayan dapat hidup sederhana dan sejahtera dengan alam. Perempuan lain yang mencari kerang dan udang disekitar teluk sebagai cara perempuan mengelola hasil lautnya dengan cara sederhana dan tradisional, walaupun demikian hasil tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, anggota keluarga dan nelayan dapat hidup sederhana dan mandiri. Kehidupan yang demikian terjadi di hampir seluruh nelayan disekitar teluk Kendari. Tetapi, kini dengan hadirnya reklamasi melalui berbagai kebijakan daerah semakin menjauhkan perempuan dari sumber pangannya dari sumber kehidupannya dan mata pencahariannya.

Hadirnya reklamasi sejak awal di tahun 2012 sama sekali tidak melibatkan masyarakat baik rencana pembangunan sampai pada informasi publik lainnya khususnya nelayan perempuan. Misalnya informasi pelebaran jalan dalam agenda reklamasi, penimbunan dan pengerukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sedikitpun tidak melibatkan masyarakat nelayan yang tinggal disekitar teluk. Persepsi umum menganggap bahwa perempuan tidak penting dan tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti kegiatan ataupun menghadiri rapat-rapat pengambilan keputusan. Karena hal tersebut didorong oleh sistem patriarki yang sejak zaman dahulu sampai saat ini menempatkan perempuan diranah domestik diranah keluarga sehingga pendapat ataupun buah pikirannya tidak didengarkan. Konstruksi sosial telah menempatkan perempuan dibelakang dari laki-laki ataupun suami mereka. Meskipun yang melakukan aktifitas nelayan ataupun mengelola hasil tangkap dikelola secara bersama-sama oleh suami dan istri dan digunakan untuk keperluan keluarga bersama dengan anak-anak, namun tetap saja perempuan tidak diperhitungkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.



Gambar 5: Perempuan nelayan sedang menjual hasil tangkapan dan buruh perempuan pesisir pantai Kendari sedang bekerja.

Sumber: <https://sultraline.id>

E. Dampak Reklamasi Teluk Kendari Terhadap Perempuan Nelayan

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sultra (2013-2018) dikatakan bahwa berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (*basic service*) yang lebih prima bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan sektor unggulan (*core competences*) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Namun pemerintah kurang memperhatikan situasi wilayah baik sumberdaya manusia dan alam lingkungan yang ada disekitar, dimana pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang disediakan untuk keberlangsungan taraf hidup masyarakat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Program dan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah berorientasi pada bagaimana perkembangan dapat terlaksana dengan cepat tanpa melihat dampak yang lebih panjang.

Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Detail terhadap Kawasan Strategis Provinsi, termuat dalam dokumen RTRW Provinsi Sultra (2013-2018), dimana Kebijakan yang dikeluarkan tidak lain untuk memenuhi kepentingan pihak swasta dalam memperlancar mekanisme perdagangan bebas dan juga investasi, memuluskan trend globalisasi melalui kebijakan dari tingkat daerah hingga ke nasional melalui perusahaan multi nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan perluasan pengembangan berbagai fasilitas mewah di wilayah pesisir pantai. Peluang besar yang demikian juga dibaca oleh aktor-aktor global dalam hal ini lembaga keuangan internasional bahwa pengembangan pesisir yang sudah direncanakan membutuhkan anggaran besar, yang tentunya daerah membutuhkan suport dari berbagai pihak terutama dari lembaga keuangan yang bergerak dalam proyek infrastruktur, pariwisata dan lembaga perdagangan bebas lainnya. Maka kondisi yang demikian menjadi peluang besar bagi investor untuk bekerjasama dengan cara menanamkan modalnya mulai dari mempengaruhi kebijakan sampai pada proyek reklamasi.

Dalam kebijakan lainnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2014-2034 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat. Maka

rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat atau dunia usaha dengan melalui kebijakan lokasi reklamasi. Kebijakan yang demikian berorientasi pada sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah. Pemerintah daerah memandang bahwa SDA berpotensi mendatangkan investor dalam setiap pembangunan dan perkembangan yang akan dilakukan. Akan tetapi kebijakan ini tidak mempertimbangkan aspek lainnya, seperti keberlangsungan hidup masyarakat yang ada disekitar wilayah pesisir yang akan terancam serta punahnya kelestarian lingkungan perairan.

Kebijakan tersebut diperkuat pula dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Kendari dengan tujuan menciptakan harmonisasi dan iklim yang baik secara proporsional dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di kota kendari antara masyarakat dengan pelaku usaha. Beberapa kebijakan ini nampak lebih jelas bahwa peruntukan pembangunan semata-mata membuka peluang besar bagi dunia usaha dan investor dalam jangka waktu panjang dan dalam memenuhi kepentingan pihak swasta. Ketidaktegasan penguasa dalam memutuskan masalah sedimentasi melalui pembangunan di Teluk Kendari ini mencerminkan arogansi dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

Berbagai pihak bahkan memaksakan kehendaknya berdasarkan kepentingan sekelompok orang untuk meraup keuntungan dalam proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan ini. Hasilnya adalah terjadinya liberalisasi ekonomi yang tidak dapat dihindarkan, dimana perluasan ekonomi semakin terbuka lebar. Liberalisasi ekonomi (Hidsan Jamil:2015:17) terjadi akibat penerapan sistem perdagangan bebas melalui mekanisme global. Penguasaan pasar dijadikan sasaran utama pada mekanisme global tersebut sehingga pelaku usaha kecil terancam hilang, keterampilan dan pengetahuan perempuan nelayan juga semakin tidak terpelihara akibat masuknya berbagai jenis produk yang ditawarkan dengan harga murah. Sementara tidak ada program-program pemerintah yang mengarah pada peningkatan kapasitas atau keterampilan pelaku usaha kecil dalam mempertahankan usahanya.

Liberalisasi meniscayakan tata pemerintahan dan ekonomi masyarakat, tata pemerintahan liberal sesuai dengan konsep *Reinventing Government*, yakni tata kelola pemerintahan dengan prinsip pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar (*market oriented government*). Sehingga fungsi pemerintah diarahkan hanyalah sebagai regulator pasar melalui sinkronisasi undang-undang. Dalam dokumen yang lain juga menyebutkan bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan yaitu harus transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Dimana implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan dalam segala hal misalkan rencana proyek reklamasi tersebut tidak secara detail menjelaskan bahwa pembuatan tambat labuh (tempat bersandarnya kapal-kapal) yang saat ini sudah berlangsung juga membuka fasilitas lain seperti wisata kuliner, rumah makan, kolam mini, hotel dan lain sebagainya yang secara keseluruhan dari berbagai fasilitas tersebut adalah milik investor yang telah menanamkan modalnya pada pembangunan, dan bukan menjadi milik warga lokal ataupun dikelola oleh daerah,.

Meski pembangunan tersebut adalah milik investor swasta, namun pemerintah biasanya berdalih bahkan menyebutkan bahwa tambat labuh digunakan untuk memudahkan akses masyarakat khususnya nelayan tradisional yang ada diwilayah pesisir teluk Kendari untuk bisa menyimpan perahunya setelah melaut. Tetapi implementasi dari

tambat labuh sendiri justru merugikan nelayan pesisir karena tambat labuh yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan khususnya perempuan, setelah 75% pembangunan tambat labuh, saat nelayan mulai menggunakannya dengan menyandarkan perahu mereka setelah berlayar namun perahu yang disandarkan rusak.

Seperti yang dikatakan oleh seorang perempuan keluarga nelayan yang bernama Sartin (33 tahun) yang tinggal di Kelurahan Tipulu Kota Kendari yang di depan rumahnya tepat didepan tambat labuh. Sartin mengatakan bahwa *“Hal tersebut karena perairan teluk semakin dalam akibat pengerukan, perahu nelayan yang diparkir semakin jauh dari rumah sehingga sulit untuk dikontrol, akibatnya perlengkapan nelayan yang digunakan seperti mesin, pukut, pancing, bahkan bahan bakar yang disediakan untuk melaut hilang karena jauh dari rumah warga”* (dok.SP Kendari 2016).

Prinsip partisipatif dalam Perda No 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Masyarakat Lokal bahwa *“Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir di dalam wilayahnya”*. Minimnya akses dan partisipasi masyarakat pesisir atas rencana pembangunan tambat labuh atau reklamasi sehingga masyarakat khususnya perempuan yang terkena dampak sama sekali tidak terinformasi berbagai aktifitas yang ada seperti pengerukan lumpur, penimbunan, pembangunan tambat labuh dan lain sebagainya.

Seorang perempuan parubaya (Johareng) usia 53 Tahun yang bekerja sebagai penjual ikan dan sekaligus nelayan udang memberikan penuturan terkait aktifitas penimbunan di teluk Kendari bahwa *“Saya tidak tahu, akan dibuat apa didalam teluk sana hanya ada timbunan, saya dengar-dengar akan dibuat taman kota, sekarang tidak bisa lagi kita turun keteluk mencari udang karena udangnya sudah habis dikeruk alat berat, ikan juga sudah kurang, ikan lari dari pinggir teluk karena penimbunan, bakau sudah habis biasanya saya cari udang disekitar bakau, mungkin bagus kalau sudah ada taman diteluk karena ramai dan lebih cantik pemandangan tapi tidak adalagi udang, kerang”* menurut perempuan nelayan dengan satu anak (Muliani) 34 tahun *“Kami tidak pernah diundang di RT apalagi diLurah untuk sosialisasi penimbunan yang sekarang sedang terjadi, hanya saja kami diundang untuk penyampaian pelebaran jalan, semua warga yang rumahnya terkena pelebaran jalan diberikan ganti rugi setiap KK”*. Dampak yang serupa saat ini dirasakan hampir semua masyarakat nelayan khususnya perempuan yang tinggal disepanjang teluk Kendari.

Dari situasi yang dialami nelayan, pembangunan kawasan tersebut seolah dipaksakan meski mendapat penolakan. Perusahaan pengembang, pemerintah daerah maupun legislatif yang terlibat dalam perkara reklamasi jelas-jelas mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mempengaruhi Eksekutif dan Legislatif tanpa menghiraukan kepentingan rakyat yang lebih besar, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan biota laut yang berada di teluk serta penghidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya di teluk.

Dampak yang lebih besar dan terus dirasakan masyarakat pesisir Kota Kendari yaitu Banjir Rob. Kejadian banjir tersebut untuk pertama kalinya di Kendari terjadi pada Juli 2013. Musibah alam tersebut menelan banyak kerugian harta benda. Sejak disahkannya agenda reklamasi, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Kendari dan Provinsi melakukan aktifitas pembangunan disepanjang pantai. Banjir kembali terjadi pada Juni 2017 dan genangan yang berkepanjangan juga mengakibatkan kerugian bahkan terdapat korban

jiwa. Situasi yang demikian terjadi karena semakin sempitnya wilayah perairan Teluk Kendari sebagai satu-satunya muara dari 3 sungai besar dan 16 anak sungai lintas kabupaten. Sehingga laju sedimentasi semakin meningkat, hilangnya fungsi daya dukung dan daya tampung akibat aktifitas reklamasi, semakin tinggi permukaan air, serta tidak adanya daerah resapan disepanjang teluk karena penimbunan, pembangunan gedung-gedung mewah, pembangunan ruko dan perumahan mewah serta aktifitas hulu sungai tidak terkontrol.



Banjir tahun 2017 Warga mengungsi



Banjir Kota Kendari Tahun 2013

Gambar 6: Banjir di kota Kendari pasca pembangunan reklamasi teluk Kendari

Terjadinya banjir untuk pertama kalinya di Kendari menjadi bukti bahwa telah terjadi kerusakan alam yang disengaja oleh pemerintah atas nama “pembangunan”. Terjadinya banjir di Kendari menyebabkan terjadi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat kota Kendari. Jika krisis air bersih terjadi, maka yang menanggung beban terberat adalah perempuan. Mengapa perempuan...?. Karena berdasarkan pengalaman pendamping perempuan nelayan kota Kendari, perempuan yang mencuci baju, memasak dan mempersiapkan kebutuhan pokok untuk suami dan anak-anaknya. Tapi karena krisis air bersih. Maka beban perempuan semakin berlipat karena ia harus mencari air bersih hingga harus berjalan kaki kemanapun tempatnya hanya untuk menemukan sumber mata air yang bersih. Disamping itu, terjadinya banjir di kota Kendari berdampak juga terhadap mata pencaharian penduduk perempuan nelayan. Dampak tersebut adalah terganggunya rotasi sumber mata pencaharian karena perempuan nelayan disamping bertanggung jawab dalam konsumsi keluarga, perempuan nelayan juga bertanggung jawab untuk mencari nafkah ekonomi keluarga. Tapi karena pembangunan reklamasi, dengan berbagai dampak yang terjadi baik fisik, ekologi, sosial-ekonomi-budaya, maka perempuan nelayan akan kehilangan sumber mata pencaharian. Disini saya menyimpulkan, bahwa telah terjadi perampasan hak hidup perempuan karena pembangunan reklamasi di teluk Kendari.

Seperti yang telah saya katakan di atas, bahwa pembangunan reklamasi sejak awal tahun 2012, tidak pernah melibatkan masyarakat baik rencana pembangunan sampai pada proses pembangunan reklamasi, khususnya kepada nelayan perempuan. Penimbunan laut dan penggerukan pesisir pantai tidak pernah Pemerintah Daerah Kendari melibatkan masyarakat nelayan yang tinggal disekitar teluk. Jika pemerintah daerah saja kepada masyarakat nelayan yang berjenis kelamin laki-laki memutus arus informasi proses reklamasi, maka kepada nelayan perempuan pemerintah daerah tidak pernah terjalin komunikasi yang baik. Ini mengindikasikan bahwa, perempuan “dipersepsikan” tidak penting dalam pembangunan reklamasi teluk Kendari.

Persepsi yang demikian terwujud dalam berbagai bentuk pengambil keputusan. Berdasarkan penuturan perempuan nelayan damping Solidaritas Perempuan Kendari, bahwa perempuan nelayan tidak dilibatkan dalam proses pengambil keputusan baik di tingkat kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Perempuan nelayan dianggap tidak memiliki banyak waktu luang untuk mengikuti kegiatan ataupun menghadiri rapat-rapat pengambilan keputusan. Padahal kalau dikaji secara seksama, saya sebagai pendamping perempuan nelayan Kendari melihat bahwa kondisi yang demikian didorong oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan diranah domestik-keluarga sehingga pendapat ataupun pikirannya tidak didengarkan oleh laki-laki dalam hal ini aparat pemerintah Kendari.

Konstruksi sosial “selalu” menempatkan perempuan dibelakang laki-laki (suami), walaupun yang melakukan aktifitas nelayan ataupun mengelola hasil tangkap dikelola secara bersama-sama dan digunakan untuk keperluan keluarga. Akan tetapi realita yang ada, perempuan tidak diperhitungkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Selain itu konstruksi sosial juga telah membentuk perempuan bahwa aktifitas utamanya hanya didalam rumah mengurus keluarga dan anak. Kondisi yang demikian, menempatkan perempuan pada kerja-kerja domestik sehingga perempuan tidak pernah dilibatkan ataupun diundang secara langsung pada rapat-rapat pengambilan keputusan mulai dari dalam rumah, maupun diranah publik. Disini saya sebagai pendamping perempuan nelayan Kendari menyimpulkan bahwa telah terjadi domestifikasi perempuan nelayan dalam ruang publik.

Atas nama budaya dan tradisi, seringkali pemerintah dan masyarakat dengan “sengaja” menggiring perempuan nelayan ke ruang domestik. Padahal kenyataan yang ada, perempuan nelayan memiliki keahlian khusus dalam bernelayan. Keahlian tersebut berbeda dengan yang dimiliki oleh keahlian nelayan laki-laki. Keahlian khusus tersebut biasa disebut dengan pengetahuan perempuan dalam ilmu nelayan. Jika perempuan nelayan digiring secara sengaja ke dalam ranah domestik. Maka pengetahuan perempuan dalam ilmu nelayan akan berhenti dan tidak bisa di transfer kepada perempuan nelayan lain yang lebih muda yang baru belajar menjadi perempuan nelayan. Jika demikian terjadi, maka telah terjadi pengungkungan pengetahuan perempuan. Padahal menurut Nunuk Murniati (2015), pengetahuan perempuan merupakan kearifan yang hanya dimiliki oleh perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki.

Penggiringan perempuan nelayan dalam wilayah domestik bukanlah selesai dari berbagai dinamika persoalan keluarga. Pengalaman pendampingan Solidaritas Perempuan Kendari, seringkali perempuan nelayan mendapat perlakuan kekerasan oleh suami dan keluarga suami. Kekerasan dalam rumah tangga keluarga perempuan nelayan menjadi semakin lumrah manakala banyak perempuan nelayan berhenti melaut dan menjadi buruh ikan karena pembangunan reklamasi yang me"mati"kan perekonomian perempuan nelayan pesisir pantai teluk Kendari karena pembangunan reklamasi menyebabkan laut tercemar sehingga ikan-ikan mati. Disini, terjadi kekerasan terhadap perempuan nelayan yang "disengaja" oleh pemerintah dan masyarakat. Apalagi dengan kondisi laut dan hasil tangkapan yang sedikit akibat pembangunan reklamasi, otomatis itu akan mengganggu kepada perekonomian keluarga. Laki-laki (suami) yang dituntut oleh budaya dan agama dan kebijakan Negara sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga akan "merasa" terganggu secara psikologi karena "tidak" mampu mencukupi kebutuhan nafkah keluarga. Berdasarkan pengalaman pendampingan, karena kondisi keterdesakan ekonomi keluarga nelayan, biasanya laki-laki (suami) tidak segan-segan bermain tangan (memukul) kepada istri dan anak-anak.

Beban ganda yang dialami oleh perempuan nelayan dalam budaya, sosial dan keluarga menjadikan perempuan nelayan sebagai jenis kelamin yang menempati posisi sebagai masyarakat miskin. Pemiskinan yang terjadi berdasarkan pengakuan perempuan nelayan dampingan, bukanlah kehendak mereka sendiri. Pemiskinan yang terjadi merupakan salah satu dampak besar dari pembangunan reklamasi yang digaungkan oleh pemerintah kota Kendari. Harus diakui bahwa perampasan penghidupan perempuan nelayan karena pembangunan reklamasi berubah dengan sangat cepat. Kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai pelanggaran hak hidup perempuan nelayan terus menerus dialami. Disisi yang lain, krisis air bersih menjadikan kesehatan perempuan nelayan dan anak-anaknya terganggu sedangkan dalam waktu yang bersamaan biaya pendidikan sekolah anak-anak nelayan tidaklah murah. Karena kondisi yang "terjepit" demikian, tidak sedikit anak-anak nelayan yang putus sekolah. Disini, saya menemukan bahwa perempuan nelayan telah mengalami pemiskinan secara struktural. Artinya, pemiskinan tersebut telah "didesain" oleh pemerintah dan masyarakat setempat kepada perempuan nelayan dengan mengacu kepada program pembangunan dan kebijakan-kebijakan daerah. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, Negara telah mendorong perempuan nelayan untuk menjadi perempuan miskin di negaranya sendiri.

Dalam lingkup yang lebih luas, pembangunan reklamasi teluk Kendari telah terjadi pergeseran struktur kehidupan sosial-budaya masyarakat pesisir teluk Kendari. Hal itu karena pembangunan reklamasi teluk Kendari pelan-pelan merubah bentuk mata pecaharian warga pesisir dari yang mulanya sebagai nelayan yang berdaulat atas lautnya sendiri berganti sebagai buruh. Disamping itu, pembangunan reklamasi teluk Kendari juga beriringan dengan pembangunan hotel-hotel, tempat pariwisata, mall, supermarket dan tempat-tempat yang bernilai uang. Berdasarkan pengalaman pendampingan oleh Solidaritas Perempuan Kendari, pembangunan reklamasi teluk Kendari beriringan dengan

pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang berkelas modern. Pembangunan dengan standar modern tersebut juga beriringan dengan perubahan struktur sosial kehidupan perempuan nelayan di pesisir pantai teluk Kendari.

F. Aktor-Aktor Kekerasan Terhadap Perempuan Nelayan²

Saat ini nelayan disepanjang teluk kendari tidak bisa lagi mengandalkan teluk kendari sebagai sumber mata pencaharian mereka sehingga warga pesisir dituntut mampu beradaptasi dengan berusaha menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Kondisi seperti yang telah diuraikan diatas tidak terhindarkan dan terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Penyumbang situasi ketidakadilan yang terus menerus dirasakan masyarakat pesisir teluk Kendari utamanya perempuan nelayan adalah tidak terlepas dari beberapa aktor yang bermain di dalamnya.

Aktor-aktor yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kerusakan ekologi dan masyarakat pesisir teluk Kendari adalah beberapa pihak didaerah seperti Walikota Kendari, perusahaan kontraktor dan konsultan lokal di daerah yang bergerak dalam pengembangan pembangunan. Bahkan, lembaga negara seperti BUMN yang didukung oleh lembaga-lembaga multi nasional yang bertujuan untuk menguasai pasar, menguasai modal melalui perubahan pola hidup, gaya hidup mengikuti trend yang ditawarkan sehingga tidak ada pilihan lain terkontrol dalam satu pengaruh yang dikuasai oleh sebagian kecil orang yang berorientasi pada penumpukan modal dan penguasaan wilayah melalui fasilitas yang ditawarkan, melalui cara hidup yang mewah dan modern serta melalui ideologi kekinian yang segalanya ternilai dengan uang. Mekanisme pasar tersebut tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak tertentu yang menjadi aktor penting dalam memuluskan niat pihak swasta maupun negara-negara maju dunia melalui lembaga keuangan internasional.

Mekanisme global yang diciptakan juga didukung oleh regulasi diberbagai negara-negara maju di dunia baik melalui lembaga negara maupun swasta. Indonesia sendiri dalam melancarkan mekanisme global tersebut ditemukan aktor penting yang memfasilitasi jalannya kepentingan global yaitu melalui lembaga negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Pada kasus Reklamsi yang dituturkan diatas, implementasi dari kebijakan negara dalam mendukung program percepatan pembangunan melalui berbagai sektor seperti infrastruktur dan pariwisata, tentunya mendapat dukungan dari pihak lain melalui lembaga Negara. Untuk pembangunan reklamasi Teluk Kendari sendiri digunakan dana APBD maupun APBN yang nilainya mencapai triliunan yang secara nasional terealisasi melalui lembaga Negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PT. SMI memiliki peran aktif dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek infrastruktur, baik yang dilakukan melalui layanan konsultasi maupun pengembangan proyek bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT. SMI didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 dan memperoleh izin usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 396/KMK.010/2009. PT. SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikut sertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral. Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk

² Kajian ini merupakan penelusuran staff Pasar Bebas & Investasi Solidaritas Perempuan Kendari dari berbagai sumber dan data, yang di dapat selama masa pendampingan di komunitas SP Kendari.

mentransformasi PT. SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial. Sektor yang dapat dibiayai diantaranya jalan tol dan jembatan serta infrastruktur sosial lainnya ([Kendari/Company-Profile-PT-SMI-April-2017-ID.pdf](#)).

PT. SMI selaku wakil Pemerintah menandatangani *Founders Agreement* dengan *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)* dan *Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)* sebagai langkah awal pembentukan perusahaan patungan di bidang pembiayaan infrastruktur, PT. *Indonesia Infrastructure Finance (IIF)*. PT IIF memperoleh izin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010. BUMN ini bekerjasama melalui lembaga keuangan dunia multi nasional yaitu IFC (*International Finance Corporation*) yang menanamkan sahamnya sebesar 19,99%. Indonesia bergabung menjadi anggota IFC sejak tahun 1968, Aktifitas IFC termasuk pembiayaan proyek-proyek swasta untuk mencari dana di pasar keuangan internasional, dan memberikan saran dan bantuan teknis untuk dunia usaha dan pemerintah, (**Error! Hyperlink reference not valid.**). SMI sendiri melalui Pemerintah Indonesia sebesar 30%, ADB (*The Asian Development Bank*) 19,99% didirikan dengan salah satu fungsinya yaitu menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Didirikan Pada pertengahan 1960-an, dimana negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan negaranya. Selanjutnya lembaga keuangan terbesar milik pemerintah Jerman, Grup KfW, DEG adalah lembaga keuangan swasta terbesar dari negara Eropa yang menyediakan modal jangka panjang, masukan hingga dukungan untuk perusahaan di negara berkembang. Lembaga keuangan ini telah aktif berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 40 tahun (<http://www.beritasatu.com>).

Aktor yang berperan dalam pengembangan megah proyek infrastruktur tak terlepas dari ketergantungan pemerintah Indonesia pada dana pinjaman dari lembaga keuangan yang tentunya mempertaruhkan kehidupan serta masyarakat Indonesia dalam jangka waktu panjang, aktor yang berperan dalam mekanisme global tersebut sampai ke daerah memiliki peran dalam implemetasi kebijakan, mereka adalah pihak perusahaan pengembang dalam menyelesaikan pembangunan yang telah terencana diantaranya PT. Manunggal Sarana Surya Pratama, PT. Maju Setia Nusa Sentosa. Dan sebagai kontraktor pelaksana PT. Sarana Perkasa Eka Lancar. Ketiga perusahaan pengembang ini adalah kontraktor dan konsultan dalam pembangunan dan penyelesaian proyek reklamasi yang ada di Teluk Kendari. Pembangunan ini diperkirakan berakhir di tahun 2018 mendatang.

G. Perempuan Tolak Reklamasi: Sebuah Penutup

Pembahasan aktor-aktor dalam pembangunan reklamasi teluk Kendari yang telah dibahas diatas, adalah sebagai gambaran bahwa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digenjot oleh pemerintah melalui program NAWACITA Jokowi ternyata tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan global dalam hal ini investor internasional atau perusahaan swasta. Pemerintah melalui mekanisme kebijakan hanya menjadi jembatan untuk memperlancar kepentingan masyarakat global. Padahal jauh di pinggir pesisir teluk Kendari terdapat perempuan nelayan dan keluarganya yang mengalami dampak buruk dari akibat pembangunan modern tersebut. Mengutip pernyataan keras Yuniarti Chuzaifah bahwa perempuan nelayan memiliki kerentanan khusus sehingga pemerintah harus mengakui keberadaan mereka sebagai bagian dari proses pembangunan. Karenanya, ketika

Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan mengadakan audiensi bersama perempuan nelayan komunitas. Dengan sepakat, perwakilan perempuan nelayan daerah di berbagai komunitas di Indonesia serempak mengatakan “Perempuan Tolak Reklamasi”.

Daftar Pustaka

- Iwan Nugroho & Rokhmin Dahuri, *Pengembangan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial & Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rechyat Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, Kementerian PU.
- Modul Terapan, Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 44/PRT/M/2007), Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Study Banding Dengan KIARA (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan), Jakarta, Jum’at, 25 Agustus 2017 pukul 15.00-21.00 WIB.
- Arieska Kurniawati, *Reklamasi Pesisir: Mengapa Perempuan Menolak?*. (<http://www.solidaritasperempuan.org>)
- Katalog Kota Kendari Dalam Angka 2017*, Kendari: Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 2017
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari 2013-2017.
- Hidsan Jamil, *Perangkap Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Nunuk Agustina Prasetyo Murniati, *Diskusi Mingguan Bersama Peserta Pondok Perempuan GAIA*, Yogyakarta 23/05/2015.